



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA
Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan**

Tribun Manado (Hal. 10)

Rabu, 15 April 2020

Legi : 120 Rumah BSPS Tunggu Kesiapan

RATAHAN, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) lewat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) siapkan untuk 120 Rumah untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat.

Dikatakan Kepala Dinas (Kadis) Novie Legi saat dikonfirmasi hari ini Selasa (14/4/2020), ditengah Pandemi Covid-19, pihaknya bakal membangun sejumlah bantuan rumah bagi para warga.

"itu sudah sudah diketahui pihak Kementerian terkait hal tersebut. Dan anggaran tersebut berasal dari dana DAK

untuk perbaikan Rumah BSPS," tutur Legi.

Akan tetapi, dengan adanya kejadian seperti ini, jadi anggaran tersebut untuk wilayah lain telah dipotong dari pusat. Dan di kabar baiknya untuk Mitra sendiri, masuk dalam kategori BSPS yang dalam pengerjaannya dilakukan oleh penerima masing-masing. "Hal ini terus berproses dari kementerian, karena pihak pusat masih meminta data dan kesiapan dari kita untuk penyeluran bantuan, terutama pengerjaannya seperti apa. Sisanya tinggal menunggu informasi dari kementerian," terangnya.

Untuk di Mitra sendiri di-

Anggaran tersebut berasal dari dana DAK untuk perbaikan Rumah BSPS

NOVIE LEGI

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

usulkan ada sebanyak 120 rumah di 5 desa, yakni Basaan, Borgo, buku utara, buku dan tetengesan. Dan untuk total dana per satu rumah, sebanyak Rp 17,5juta yang digelontorkan.

"Sebenarnya hanya Rp 15 juta saja, dan Rp 2,5 juta sebagai ongkos buruh dan

pekerja selama pengerjaan. Pada dasarnya persyaratannya seperti itu," pungkas Legi.

Lanjut dikatakannya, data yang dirangkum untuk penerima bantuan tersebut, berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) untuk masyarakat pendapatan dibawah rata-rata. "Nantinya,

setelah diusul, dari desa untuk penerima bantuan. Akan ada tim yang bakal turun ke lapangan untuk mengecek langsung kondisi keluarga tersebut. Begitu juga dengan lahan yang bakal dibangun apakah milik sendiri atau bermasalah," jelasnya.

Ia juga menambahkan, bantuan tersebut, diprioritaskan untuk wilayah kumuh. "Jadi itu maknismenya. Lewat Menti PUPR, kita tinggal menunggu hasilnya seperti apa. Kerena program tersebut sudah di terima pihak pemerintah pusat. Mereka tinggal menunggu keseluruhannya dari kita saja, karena pihak pemerintah pusat bakal ber-

tanya kesiapan daerah masing-masing," tukasnya.

Diketahui juga, untuk teknis pengerjaan bakal sesuai dengan standart pengerjaan pihak Pekerjaan Umum (PU). "Selin itu, untuk sistem penyeluran kita gunakan via *transfer kepada beberapa toko* bangunan yang telah bekerjasama dengan Pemkab.

Kemudian pihak toko menyuplai ke lokasi rumah yang bakal diberi bantuan. Dan untuk tenaga kerja, kita lakukan sosialisasi gotong royong sebagai bentuk bekerja kelompok kepada masyarakat. Karena bisa sangat membantu dalam hal ini," tutupnya.

(ano)